

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

Dasilva Romedios Wakman ¹ Zakaria ✉ Fahrudin Pasolo ³ Abdul Rasyid ⁴ Ridwan Rumasukun ⁵

¹, Magister Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Indonesia

✉ ^{3,4,5} Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan model penelitian Survey yang bertujuan untuk mengkaji dampak, akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada Distrik Elelim di Kabupaten Yalimo, dengan teknik Total Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 81 dari 44 Desa, DPMD dan Badan Permusyawaratan Desa Distrik Elelim dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan sistem pengendalian internal (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y), variabel akuntabilitas merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh dalam peningkatan pengelolaan keuangan dana desa dengan pencapaian Standardized Coefficients Beta sebesar 0,336 dan THitung sebesar 5,424 lebih besar jika dibandingkan dengan variabel lain dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil analisis uji f menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan dana Desa, dengan perolehan f hitung sebesar 92,057 dengan tingkat signifikansi 0,000 perolehan nilai adjusted r-square sebesar 0,773 mengandung arti bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal memberikan kontribusi sebesar 77,3% terhadap peningkatan Pengelolaan keuangan dana desa dilingkungan Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, sedangkan sisanya 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; Perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, kepemimpinan desa, penggunaan sistem informasi, kebijakan dan variabel-variabel lain.

Kata Kunci: *akuntabilitas; transparansi; sistem pengendalian internal; pengelolaan keuangan; dana desa.*

Copyright (c) 2025 Dasilva Romedios Wakman

✉ Corresponding author :

Email Address : zakariahatta15@gmail.com

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN).

Pemerintahan desa merupakan skala terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Namun demikian, peran dari pemerintahan desa sangat esensial dalam otonomi daerah dengan alasan desa memiliki kebebasan dan hak untuk membuat aturan dan regulasi dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Menurut (Saputra, 2022) Desa merupakan pemukiman bagi masyarakat yang tata kelola pemerintahannya dijalankan secara mandiri dan dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Arti kemandirian bahwa desa berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dengan adanya otonomi daerah ini mengharuskan desa agar dapat memaksimalkan dalam hal pengaturan tata kelola pemerintahannya dan bagaimana cara mengelola keuangan secara baik dan benar agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, serta beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK No. 201/PMK.07/2022, PMK No. 145 Tahun 2023, PMK No. 146 Tahun 2023, dan PMK No. 108 Tahun 2024. Peraturan-peraturan ini mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Dalam implementasinya, setiap desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan tujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat desa.

Distrik Elelim di Kabupaten Yalimo merupakan salah satu wilayah yang mengalami dinamika dalam alokasi dan pemanfaatan Dana Desa selama periode 2022–2024. Data menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, alokasi Dana Desa kembali meningkat di tahun 2024. Namun demikian, tren penurunan surplus dana selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan potensi menurunnya efisiensi pengelolaan anggaran. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya akses terhadap sumber daya manusia yang kompeten memperburuk implementasi sistem pengendalian internal di tingkat desa. Permasalahan lainnya adalah minimnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan publik, lemahnya sistem audit dan pengawasan, serta kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa sangat diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan serta memperkuat fungsi pengawasan internal desa.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, temuan mereka menunjukkan hasil yang belum konsisten, tergantung pada karakteristik wilayah penelitian. Studi yang mengangkat konteks daerah dengan keterbatasan akses seperti Distrik Elelim masih terbatas. Oleh karena

itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal memengaruhi pengelolaan keuangan Dana Desa di Distrik Elelim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan struktural yang tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam rangka memperkuat tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance, demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan (Mardiasmo, 2021) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang didukung oleh penelitian (Putri & Maryono, 2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dimana hasilnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas, berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian terdahulu lainnya yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Antara lain diteliti oleh (Desrivia Rahmadani, 2022), (Ardelia & Handayani, 2022), (Latif et al., 2021), (Maju, 2020), (Dharmakarja et al., 2020b) dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020).

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Siregar & Pasaribu, 2022). Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian

pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan (Yanti & Tiswiyanti, 2023) tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang didukung oleh penelitian (Putri & Maryono, 2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dimana hasilnya menunjukkan bahwa transparansi, berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian terdahulu lainnya yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Antara lain diteliti oleh (Panjaitan et al., 2022), (Desrivia Rahmadani, 2022), (Rabbany & Nugroho, 2021), (Hasliani & Yusuf, 2021), (Latif et al., 2021) (Maju, 2020), (Dewi & Sapari, 2020), dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Tiyas Nugroho, dkk, 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa di kabupaten Ngawi) didukung oleh penelitian (Panjaitan et al., 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Motung dan penelitian serta peneliti lainnya seperti (Puspa & Prasetyo, 2020), (P. Dewi & Julianto, 2020) dan (Arfiansyah, 2020), menunjukkan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa wajib memperhatikan good governance sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip good governance meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Mardiasmo, 2019), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan menciptakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan proses kerja sama antara masyarakat dan stakeholders untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Dalam pemerintahan desa diperlukan sistem pengendalian internal, sebagai proses dimana suatu organisasi menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada. (Aramide et al., 2015)

pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menyatakan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, Penelitian (Putri & Maryono, 2022) dan (Desrivia Rahmadani, 2022) menunjukkan bahwa secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, penelitian (Rabbany & Nugroho, 2021) penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi, dan SPI secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitass Pengelolaan Dana Desa yang didukung oleh (Panjaitan et al., 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

METODOLOGI

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelien ini adalah penelitian penjelasan (explanatory), penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variable-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2013). Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan menguji jalur empiris dan pengukuran berdasarkan teori yang ada. Model penelitian ini adalah model survey dengan menggunakan instrument kuesioner. Metode penelitian survey dilakukan untuk mendapatkan data opini individu responden. Penelitian ini menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 92 responden, dimana dari masing-masing Desa diwakili oleh 2 responden aparat Desa, DPMD 2 responden dan BPPD diwakili oleh 2 responden. Sampel dalam penelitian adalah seluruh jumlah populasi dengan teknik pengambilan sampel jenuh atau total sampling. Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 92 responden atau 100% dari jumlah populasi dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampel Jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer berasal dari pengisian kuesioner oleh responden dan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Di dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui angket (kuesioner). Adapun data sekunder ini diperoleh melalui jurnal, buku maupun internet.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016). Di dalam penelitian ini menggunakan skala likert dalam pengukuran sebagai rujukan dan standar penelitian data. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini terukur dan menghasilkan data yang valid. Karena pengukuran sampel yang dilakukan harus bersifat obyektif. Data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan pengolahan dengan menggunakan program statistic SPSS for windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas dikatakan valid apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. (Ghozali, 2013). Uji validitas menggunakan pengujian construct validity yang dilakukan dengan teknik korelasi antar skor butir pertanyaan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya, dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS dapat mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha, Menurut (Sugiyono, 2017) memberikan kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas yaitu sebesar nilai Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,8-1 menunjukkan reliabilitas baik, nilai sebesar 0,6-0,75 berarti reliabilitas diterima, dan jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,6$ menunjukkan reliabilitas kurang baik.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Item	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)	Y1	0,738	0,2185	Valid	0,892	Sangat Reliabel
	Y2	0,777	0,2185	Valid		
	Y3	0,799	0,2185	Valid		
	Y4	0,809	0,2185	Valid		
	Y5	0,694	0,2185	Valid		
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,768	0,2185	Valid	0,867	Sangat Reliabel
	X1.2	0,789	0,2185	Valid		
	X1.3	0,865	0,2185	Valid		
	X1.4	0,664	0,2185	Valid		
	X1.5	0,698	0,2185	Valid		
Transparansi (X2)	X2.1	0,743	0,2185	Valid	0,898	Sangat Reliabel
	X2.2	0,706	0,2185	Valid		
	X2.3	0,711	0,2185	Valid		
	X2.4	0,663	0,2185	Valid		
	X2.5	0,383	0,2185	Valid		
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X2.6	0,483	0,2185	Valid	0,842	Sangat Reliabel
	X2.7	0,520	0,2185	Valid		
	X3.1	0,740	0,2185	Valid		
	X3.2	0,821	0,2185	Valid		
	X3.3	0,813	0,2185	Valid		
	X3.4	0,853	0,2185	Valid	0,842	Sangat Reliabel
	X3.5	0,644	0,2185	Valid		
	X3.6	0,566	0,2185	Valid		

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan 1, dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) dan variabel pengelolaan Dana Desa (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung $> R$ Tabel dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan

Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator $> 0,2185$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid.

Berdasarkan Tabel 1 Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha $> 0,80$ hal ini menunjukkan bahwa Pernyataan dalam kuesioner ini Sangat Reliabel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,80. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksinya menggunakan uji normalitas berdasarkan grafik Normal Probability Plot (P-Plot) dan uji normalitas berdasarkan kolmogorof-Smirnov Tes.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,23415781
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,035
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan tabel 2 hasil uji Kolmogorof-Smirnov di atas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi unsur normalitas. Hal ditunjukkan dengan dengan nilai Asymp.Sig. (2 failed) sebesar 0,200c.d. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen (Bebas). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas (multiko). (Sugiyono, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen). Uji multikolonieritas dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai angka Tolerance $> 0,10$ dan mempunyai nilai VIF < 10 (Sugiyono, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

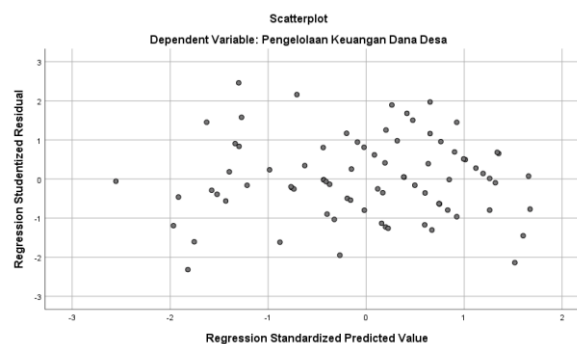
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	0,497	2,011
	Transparansi	0,353	2,829
	Sistem Pengendalian Internal	0,465	2,151

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Dari tabel 3, di peroleh nilai tolerance Akuntabilitas (X1) sebesar 0,497, Transparansi (X2) sebesar 0,353, dan Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,465, dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Akuntabilitas (X1) sebesar 2,011, Transparansi (X2) sebesar 2,829, dan Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 2,151, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤ 10 , dimana dan

nilai Tollerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, dan hal ini menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel independen, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghazali (2013). Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tersebut memiliki kesamaan varians atau data bersifat homogen. (Sugiyono, 2016).



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 1 grafik scatterplot diatas menunjukan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Analisis regresi berganda digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) sebagai variabel bebas (Independent) terhadap pengelolaan keuangan dana desa sebagai variabel terikat (Dependent).

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,984	1,239		1,601	0,113
1 Akuntabilitas	0,336	0,062	0,409	5,424	0,000
Transparansi	0,292	0,073	0,358	3,999	0,000
Sistem Pengendalian Internal	0,164	0,056	0,230	2,942	0,004

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Dari Tabel 4, dapat diperoleh model persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yaitu:

$$Y = 1,984 + 0,336X_1 + 0,292X_2 + 0,164X_3 + e,$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,984 memiliki arah positif, yang berarti bahwa pengelolaan dana desa di lingkungan Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, dapat meningkat sebesar 1,984 satuan atau setara dengan 19,84% meskipun tanpa dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,336 menunjukkan arah positif, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan akan berdampak pada peningkatan pengelolaan dana desa sebesar 0,336 satuan atau 33,6%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel transparansi (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,292 bernilai positif, yang berarti bahwa peningkatan transparansi sebesar satu satuan akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,292 satuan atau 29,2%, dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan. Terakhir, variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,164 dan menunjukkan arah positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar satu satuan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan dana desa sebesar 0,164 satuan atau 16,4%, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Temuan ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen berkontribusi positif terhadap pengelolaan dana desa di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo.

Pengujian uji simultan bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (bebas) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (terikat), (Sugiyono, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengujian hipotesis ini menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut ; Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 5. Hasil Uji f (uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	437,037	3	145,679	92,057	,000 ^b
1 Residual	121,852	77	1,582		
Total	558,889	80			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for windows pada tabel 5.17 diperoleh nilai F hitung sebesar 92,057 > 2.49 nilai sig (p value) sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 nilai (sig) = 0,000 < alpha yang dipersyaratkan (0,05.), dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa di lingkungan Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, sehingga hipotesis keempat diterima.

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dikatakan kuat apabila dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen antara 0 (nol) dan 1 (satu). (Ghozali, 2014). Nilai adjusted R Square menandakan kemampuan variabel- variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2014).

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,884 ^a	0,782	0,773	1,25797	2,250

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompetensi SDM, Disiplin Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: Olah Data 2025, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai Adjusted R² sebesar 0,773 hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) terhadap variabel dependen Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Elelim Kabupaten Yalimo sebesar 77,3% Sedangkan sisanya 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; Perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, kualitas laporan, regulasi atau kebijakan dan variabel-variabel lain.

Pembahasan

Hasil penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di wilayah Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Temuan ini mempertegas pentingnya tata kelola keuangan desa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance, sebagai respons terhadap meningkatnya alokasi dana desa melalui kebijakan pemerintah pusat. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, efisien, serta berorientasi pada partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan lokal.

Pertama, akuntabilitas merupakan unsur fundamental dalam proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Di Distrik Elelim, akuntabilitas tercermin dari laporan keuangan desa yang telah disusun dan dipublikasikan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat, pelaporan yang terbuka, serta penguatan pengawasan internal. Dalam konteks teori agensi, akuntabilitas mencerminkan kewajiban pihak penerima mandat (pemerintah desa) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi mandat, yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas secara adil dan profesional (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, akuntabilitas menyangkut teknis pelaporan keuangan, dan mencakup aspek moral dan etika publik yang berimplikasi pada meningkatnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Implementasi akuntabilitas yang optimal akan mendorong desa untuk menyusun sistem pelaporan yang terstruktur, terbuka, serta mampu memberikan jaminan keandalan terhadap pengelolaan anggaran, sekaligus memfasilitasi pengawasan secara kolektif oleh masyarakat dan lembaga formal.

Kedua, transparansi berperan sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas, serta sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik kualitas pengelolaan dana desa. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan desa, termasuk akses publik terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, dan pelaporan akhir. Dalam praktiknya, transparansi yang diterapkan di Distrik Elelim belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah menunjukkan arah yang positif. Implementasi transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan informasi dalam bentuk papan informasi desa, pelaporan keuangan melalui media daring, dan pelaksanaan musyawarah desa secara terbuka. Digitalisasi informasi keuangan desa menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung transparansi, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem keuangan desa (Siskeudes) yang memungkinkan monitoring dan pelaporan dilakukan secara real-time. Transparansi yang baik akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, menguatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi sosial atas seluruh proses pengelolaan dana desa. Dalam perspektif jangka panjang, transparansi mampu menciptakan iklim pembangunan yang inklusif dan demokratis karena masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran publik.

Ketiga, sistem pengendalian internal memiliki peran strategis dalam menjamin terciptanya pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, dan sesuai regulasi. Dalam konteks penelitian ini, SPI dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, seperti keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di Distrik Elelim memberikan kontribusi positif terhadap kualitas tata kelola keuangan desa. Namun demikian, pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang baku, pembentukan tim pengawas internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta audit keuangan berkala oleh inspektorat daerah. Dalam kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), SPI terdiri dari lima komponen penting: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima aspek ini jika dijalankan secara konsisten, akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mengurangi potensi terjadinya penyimpangan, dan mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. SPI mendorong integritas aparatur desa serta meningkatkan disiplin anggaran dalam setiap tahapan penggunaan dana.

Secara simultan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan SPI berpengaruh secara individual, memiliki pengaruh kolektif yang saling memperkuat dalam menciptakan tata kelola dana desa yang kredibel dan berkelanjutan. Ketiganya berkontribusi secara langsung terhadap efektivitas pemanfaatan dana, efisiensi pengeluaran, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan desa. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya (Desrivia Rahmadani, 2022; Latif et al., 2021; Panjaitan et al., 2022; Tiyas Nugroho et al., 2022; Susilowati et al., 2020), yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Namun

demikian, tidak semua studi menunjukkan hasil serupa. Sebagai contoh, penelitian oleh Mutmainah dan Pramuka (2019) menyimpulkan bahwa SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual berdasarkan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Desa di Distrik Elelim perlu mengadopsi pendekatan strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola dana desa. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial, digitalisasi sistem informasi keuangan desa, pembentukan tim audit internal, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan menerapkan pendekatan tersebut secara konsisten, diharapkan pengelolaan dana desa di Distrik Elelim dapat memenuhi prinsip good governance, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta menciptakan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Temuan ini menegaskan bahwa keempat variabel tersebut memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini memiliki implikasi strategis, mengingat pemerintah desa diberi kewenangan luas dalam pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN, sehingga penguatan tata kelola menjadi aspek krusial dalam menghadapi tantangan geografis, keterbatasan SDM, dan kompleksitas administrasi yang khas di wilayah tersebut.

Akuntabilitas memiliki peran fundamental dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan desa dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas mencakup kewajiban moral dan administratif pengelola dana untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan atas pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta hasil kegiatan pembangunan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi memastikan tercapainya efisiensi penggunaan dana dan hasil pembangunan yang terukur serta berdampak positif bagi masyarakat. Studi oleh Cahyani et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan adanya hubungan signifikan antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan informasi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi program desa. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisasi. Penelitian Budiasni & Ayuni (2020) menambahkan bahwa penerapan transparansi yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti kesetaraan dan kebersamaan, mampu meningkatkan kualitas tata kelola desa secara signifikan. Sistem pengendalian internal (SPI) berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi risiko penyimpangan serta menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai tujuan. SPI terdiri atas komponen-komponen penting seperti lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lestari et al. (2019), yang menunjukkan bahwa lemahnya implementasi SPI menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, penguatan SPI menjadi urgensi untuk menciptakan sistem keuangan desa yang andal dan bebas dari praktik koruptif.

Keempat variabel ini bekerja secara simultan dan saling melengkapi dalam membentuk sistem tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, pengelolaan dana desa akan mencerminkan prinsip-prinsip good governance: transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Nyoman et al. (2025) menegaskan bahwa kombinasi antara akuntabilitas, transparansi, dan SPI dapat menciptakan sistem keuangan desa yang bersih, efisien, dan terpercaya. Dengan demikian, upaya perbaikan tata kelola keuangan desa melalui reformasi administratif dan teknis, menuntut pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta partisipasi publik. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang sesuai regulasi, berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi:

- Angelia, R.S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) *The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management* (A. Universitas Telkom, 7(1), 1008–1014. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/11589>
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–16.
- Arfiansyah, M. A. (2020a). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arfiansyah, M. A. (2020b). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Desrivia Rahmadani, Z. dan M. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 224–232. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IAP/article/view/29296>
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020a). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020b). Pengaruh

- Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, A. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal Balance*, XVI(1).
- Fajaruddin, F. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:239705717>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2021). Financial reporting, public services and local executives' re-electability in Indonesia Financial reporting, public services and local. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939229>
- Ghozali, I. (2013). Analisa Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). Model persamaan struktural Konsep dan Aplikasi dengan program Amos 22. Badan penerbit Undip.
- Halim, A. R., & Kusufi, M. S. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:111622978>
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 179–192. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Journal Systems*, 15(12), 5889–5896.
- Istianah, I., Sari, N. P., & Indriani, V. (2024). A systematic review of public sector audits in Indonesia. *JTAKEN*, 10(1), 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1544>
- Kaomaneng, I. S., Jenny Morasa, S. E., & Hendrik Gamaliel, S. E. (2023). Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik. Mega Press Nusantara.
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183–192.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2019). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan

- Dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27–37.
<https://doi.org/10.51713/jamms.v2i1.21>
- Nilna Syifa Zahro, Yolanda Afri Liyani, H. M. (2023). Faktor-faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa 1. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3).
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen* (M. B. H. Ibrahim, Ed.). Perdana Publishing.
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Benyamin Siahaan, S. (2022). Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa). *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- Putri, R., Sutarjo, A., & Desmiwerita, D. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 162–173.
<https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.847>
- Rabbany, G. B., & Nugroho, W. S. (2021). The 4 th Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology. <https://Journal.Unimma.Ac.Id>, 633–647.
- Saputra. (2022). Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada KSPPS BTM Mulia. *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 69–79.
- Siregar, D. A. A., & Pasaribu, F. (2022). Pengaruh Dukungan Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Awak Kapal Tunda Melalui Kepuasan Kerja Pada PT. Aman Bahari Kuala Tanjung. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 215–228.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:252964622>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiyas Nugroho, A., Agus Sudarajat, M., Cholis, M., & Zahri, R. M. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desanya di Kabupaten Ngawi). *Edunomika*, 6(2), 1–9.
- Tjiptoherijanto, P. (2019). Good Governance: Between Paradigm and Reality. *Journal of Public Administration*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22259/2642-8318.0102005>
- Yanti, E. R., & Tiswiyanti, W. (2023a). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64.